



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, SERTA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Sidang	:	I
Rapat	:	Ke - 4
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	:	Selasa, 23 Agustus 2022
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	14.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (KK V) Gedung Nusantara
Acara	:	Membahas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko
Ketua Rapat	:	Ir. Ridwan Bae
Sekretaris	:	Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	:	dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan virtual

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda hari ini adalah Membahas pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) untuk menyampaikan paparannya
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. Ketua Gapensi menyampaikan ada 5 masalah terkait pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko yang berhubungan dengan jasa konstruksi *pertama* Eskalasi harga, yang mengkhawatirkan di penghujung di akhir tahun ini banyak pelaku dunia jasa konstruksi yang akan berurusan dengan hukum karena harga rantai pasok harga bahan dan upah cukup tinggi, dan hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah. *Kedua* terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi; *Ketiga* peran LPJK yang sangat lemah; *Keempat* dominasi BUMN; *Kelima* peran Kementerian PUPR yang belum menangani masalah jasa konstruksi.
2. Komisi V DPR RI telah mendengarkan masukan Ketua Gapensi dan akan menyampaikannya pada forum Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 23 Agustus 2022

KETUA RAPAT,



RIDWAN BAE